**DAFTAR PUSTAKA**

Andhika, A. dkk. (2020). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19*.

Atharazka. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jumper: Jurnal Ekonomi Perjuangan*.

Aulia, Z. (2014). Undang-undang Nomoe 6 Tahun 2014 tentang *Desa. Jumper: Jurnal Ekonomi Perjuangan.*

Bawono, I. R dan Setyadi, E. 2019. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.*

Bungin, B. (2017). *Analisis Uji Dependability dalam Penelitian Kualitatif.*

Depdiknas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.*

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020. *Peringkat Status Indeksa Desa Membangun (IDM) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa Tahun 2020, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.*

Eliza, A. N. (n.d.). *7.-Dana-Desa.pdf*.

Emzir. (2018). *Metode Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif*.

Fahrudin, A. (2018). *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*.

Faturrahman, Fadli et., A. (2020). *Perubahan Alokasi Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan p Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu.*

Hafid, R. (2016). *Pemanfaatan Dana Desa serta Pembangunan Desa pada Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*.

Halimah, C. (2020). Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Hartono, R. 2021. *Sejarah Desa Karanglo*. <http://Karanglo-Brebes.desa.id>

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta.*

Kementrian Dalam Negeri, 2020, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen, Jakarta, 76:85.*

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertiggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.2020.*Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.*

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.2020.*Surat Edaran No.11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.*

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indpnesia.2020. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*.

Laksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. 173.

Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, H. R. . W. (2017). *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*.

Lutfikha, I. (2018). *Pendahuluan*. *09*, 2–5.

Maulana, M. I. (2016). *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.*

Martajaya, A. dan Sugiri, D. 2021, *Implementasi Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Karanganom Kabupaten Klaten. Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi): Vol. 9 No.2 Nov 2021.*

Moleong. Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Menteri, N, 7 P, (2022). *Berita Negara.2019(961)*.

Mulyani, E. (2020). *Efek Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Ndatangara, CHRA., Yasinta, PN., dan Prabawati, NPA., 2021, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan COVID-19 Di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.2*

Noor, R. (2020). *Pemanfaatan Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19*. 1–11.

Nurliana. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku*.

Nurnisma. (2021). *Penyaluran Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa*. *19*.

Oktariansa, I. (2021). *Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Pemanfataan Dana Desa*. *September 2020*.

Pamungkas. (2020). *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa*.

Pamungkas, Binar Dwiyanto, S. dkk. (2020). *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19.*

Pratama, A. (2020). *www.jdih.kemenkeu.go.id*.

Pratama, J. K. A. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung*. 1–9.

Pratiwi. (2020). *Implementasi Program Dana Desa di Desa Pandung Batua Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*.

Putera, R. E. (2019). *Dana Desa*. 9–28.

Purnomo, B. 2021. *Sejarah Desa Jatibarang Kidul dan Desa Jatibarang Lor.* <http://jatibaranglor.desabrebes.id>. <http://jatibarangkidul.desabrebes.id>

Safitri, C. (2020). Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, *2. 2020*.

Subagja. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19*. 6–25.

Sunarto. 2021. *Sejarah Desa Pamengger.* <http://profilbaru.com>

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*.

ViskaLee. 2015. *Teknik Analisis Dalam Penelitian Mendalam.* <http://widodoiain.blogspot.co.id/2015/02/teknik-analisis-data-dalam-penelitian.html>

Valentina. (2020). *Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota*. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang: Vol. 2 Tahun 2020 Hal. 124-132.*

Winaryo. 2021. S*ejarah Desa Rengasbandung*. <http://rengasbandung.desabrebes.id>

Widodo, A. (2020). *Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa 1. TNP2K. Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2020, Kecamatan Jatibarang Dalam Angka, BPS Kabupaten Brebes.*

Widagno. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmirasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jurnal Ekonomi Perjuangan*

Paleh. 2021. *Sejarah Desa Kalipucang*. <http://Kalipucang-Brebes.desa.id>

Pamungkas, Bambang. 2013. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Konsep dan Praktek Berdasar Peraturan Perundangan Jilid 1. Bogor.Kesatuan Press.*

Pratama, Z. 2021. *Index Penelitian Kualitat*i*f*. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/3447>.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, 2020, *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020, 2020, *Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.*

Permendagri, 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menteri Dalam Negeru Republik Indone*sia.

Permendagri, 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa. Republik Indonesia. Purwantara, S., 2018, Konservasi Sumber Daya Air Tanah Di Wilayah Ngaglik Sleman, Geomedia: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian: Volume 16 No.2 Tahun 2018.*

Ridha, Fahrul. 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Langsa. Jurnal At-Tawassuth, Vol.IV(2): 252-276*

Rindorindo, PV. Mantiri, MS. Pati, AB., 2021*, Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak COVID-19 di Desa Motoling Kecamatan Minahasa Selatan, Jurnal Governance: Volume 1 No 1 Tahun 2021 Hal 1-10*.

Syam, TW., 2021, *Transparasi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto,* Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Talibo, Ishak. 2013. *Fungsi Manajemen Dalam Perencanaan Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Islam Iqra* 12(1):1-30.

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. E-Journal Pemerintah Integratif* 1(1): 51-56.

Thorik, M. 2011. *The Young Librarian Wordpress. Sumber Informasi Primer dan Sumber Informasi Sekunder.* <https://theyounglibrarian.wordpress.com/2011/04/16/sumber-informasi-primer-dan-sumber-informasi-sekunder/>

Yusup, M., Abdullah, J. dan Hasan, W. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Komputersisasi Akuntansi 10(2): 189-208.*

Zurhan, A. 2022. *Pengelolaan Dana Desa Di Era Covid-19*. October. 13, 2022. Universitas Negeri Islam Surabaya. <http://diglib.uinsby.ac.id/7354/bab%203.pdf>

**LAMPIRAN**

1. **Pertanyaan**
   1. Berapa besarnya dana yang digunakan untuk mendanai program- program untuk penanganan wabah *COVID-19* ?
      1. Berapa persentase dana desa yang digunakan untuk program- program penanganan wabah *COVID-19* ?
      2. Apakah besarandana yang tersedia cukup untuk memenuhi target penanganan wabah *COVID-19* ? Bagaimana realitanya? Jelaskan!
   2. Darimana saja sumber dana yang diterima oleh desa untuk penanganan wabah *COVID-19* ? Jelaskan!
      1. Dari mana sajakah sumber dana yang berasal dari pemerintah? Berapa jumlahnya?
      2. Dari mana sajakah sumber dana yang berasal dari non-pemerintah? Berapa jumlahnya?
   3. Siapa pengelola dana penanganan *COVID-19* yang diterima oleh Kecamatan dan desa?
      1. Bagaimana susunan gugus tugas penanganan *COVID-19* ke wilayah Kecamatan Jatibarang?
      2. Siapa yang melaksanakan program-program penanganan *COVID-19* di wilayah Kecamatan Jatibarang?
   4. Bagaimana proses perencanaan anggaran penanganan wabah *COVID-*

*19* di Kecamatan Jatibarang? Panduan apa yang digunakan?

1. Apakah proses perencanaan sudah sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku?
2. Apakah terdapat kendala dalam perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan?
3. Prioritas apa sajakah yang masuk dalam perencanaan?
4. Apakah perencanaan sudah menampung aspirasi masyarakat?
   1. Bagaimana pelaksanaan penanganan wabah *COVID-19* ?
      1. Bagaimanakah bentuk penanganan wabah *COVID-19* di wilayah kecamaan Jatibarang?
      2. Apa saja program yang telah dilakukan untuk penanganan wabah *COVID-19* ?
      3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanan program- program tersebut?
      4. Apakah terdapat pendampingan dan pengawasan dari instansi- instansi terkait? Bagiamana prosesnya?
   2. Bagaimana penatausahaan dalam penanganan *COVID-19* ?
      1. Apakah penatausahaan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang- undangan? Jelaskan!
      2. Apakah penatausahaan dilakukan secara tertib dan disiplin? Jelaskan!
      3. Adakah kendala dalam penatausahaan anggaran untuk penanganan *COVID-19* ? Jelaskan bila ada!
      4. Apakah ada sistem tertentu yang digunakan untuk penatausahaan dan pelaporan? (Contoh : siskeudes)
   3. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban penanganan *COVID-19*?
      1. Apakah pelaporan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang- undangan?
      2. Apakah pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan?
      3. Bagaimana laporan bulanan, laporan semester 1 dan semester 2 dilaksanakan?
      4. Bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat dilaksanakan?
      5. Apakah terdapat kendala? Jelaskan bila ada?
   4. Apa saja dukungan dan hambatan yang dihadapi desa dalam mengalokasikan dana dan realisasi program?
      1. Dukungan apa saja yang diberikan oleh pemerintah?
      2. Dukungan apa saja yang diberikan oleh selain pemerintah?
      3. Apakah ada hambatan kualitas sumber daya?
      4. Adakah hambatan lainnya? Jelaskan!
   5. Evaluasi apa saja yang telah dijalankan oleh pemerintah desa?
      1. Apakah langkah evaluasi tersebut efektif?
      2. Apa kendala dalam proses evaluasi tersebut?
5. **Verbatim Subjek**

Nama Subjek : ES

Pekerjaan : PNS

Waktu : 13 Juli 2023, pukul 09.20 – 11.25 WIB

Tempat : Kantor Subjek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelaku | Uraian Wawancara | Tema |
| Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek | Bagaimana sebenarnya pengelolaan Dana Desa dan Pemanfaatannya ketika terjadi pandemi *Covid-19* Bu?  Pengelolaan dan pemanfaatannya sendiri banyak mengalami perubahan, karena instruksi dari pemerintah pusat menganjurkan bahwa penggunaannya harus difokuskan untuk penanganan wabah *Covid* mba, sehingga untuk pengelolaannya ya kita alihkan yang mulanya untuk kepentingan pembangunan di desa-desa, untuk semasa *Covid* kita alihkan untuk penanganan *Covid* terutama untuk pemberian bantuan ke masyarakat.  Jadi, untuk penanganan *Covid* sendiri dananya memakai dari Dana Desa yah Bu?  Sebenarnya tidak hanya dari dana desa saja sih mba, beberapa desa ada yang memakai dananya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Untuk besaran dana sih gimana Bu? Kan itu ada yang dari Dana Desa dan dari PAD, apakah besarannya sama disetiap desanya?  Besaran dana yang diperoleh tiap desa itu berbeda mba, tergantung banyaknya masyarakat yang terkena *Virus Covid*, kalau di desa tersebut masyarakatnya banyak yang terkena ya, otomatis dana yang akan diperoleh lebih besar dari desa yang satu dengan yang lainnya, karena intruksi yang dikeluarkan pemerintah kan disuruhnya untuk difokuskan ke penanganan *Covid* mba. | Arti Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Era Pandemi *Covid-19*  Sumber dana untuk Penanganan *Covid-19*  Besaran Dana yang digunakan |

Nama Subjek : BP

Pekerjaan : PNS

Waktu : 25 Juli 2023, pukul 12.20 – 14.10 WIB

Tempat : Kantor Subjek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelaku | Uraian Wawancara | Tema |
| Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek | Siapa pengelola dana untuk penanganan *Covid-19* yang telah diterima oleh desa?  Untuk pengelola dana pada saat pandemi, baik yang dari dana desa maupun PAD itu pamong/perangkat desa tersebut. Yang bertanggungjawab ya kepala desanya, sama tim yang dibawahinya yaitu gugus tugas mba. Pemerintah sebagai pengampu kegiatan yang sedang dikelola desa, namun untuk masalah keuangannya ya tetap yang ngampu itu bendahara desa.  Kalau untuk proses perencanaan anggarannya sih itu bagaimana pak?  Ditahun 2020 untuk proses perencanaan yang diperuntukkan untuk penanganan *Covid-19* sendiri, mengalami 2-5 kali revisi anggaran mba, hal ini karena setiap desa harus mengikuti intruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga mau tidak mau desa harus mengikuti revisi tersebut, meskipun terbilang cukup berat.  Untuk prioritas penggunaan anggarannya sendiri itu bagaimana pak?  Kalau prioritas dimasa pandemi ya jelas untuk penanganan *Covid* mba, tetapi *Covid* kan masuknya sekitar bulan maret, sudah agak menengah. Jadi, kalau ada desa yang sudah berlari dengan kegiatan lain, ya tidak bisa disalahkan. Yang penting sudah terealisasi, dan sisa anggarannya harus digunakan untuk penanganan *Covid-19*. | Pengelola dana saat pandemi  Perencanaan Anggaran  Prioritas Penggunaan Anggaran |

Nama Subjek : M

Pekerjaan : Kepala Desa

Waktu : 10 Agustus 2023, pukul 12.35 – 14.40 WIB

Tempat : Kantor Subjek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelaku | Uraian Wawancara | Tema |
| Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek | Apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam perencanaan anggaran pada masa pandemi?  Sebagian desa dalam melakukan perencanaan anggaran, khususnya dimasa pandemi, kebanyakan perangkat desanya melakukan koordinasi dan musyawarah dengan BPD/BPKal, serta dari dukuh-dukuh sebagai perwakilan dari masyarakat desa serta lembaga. Tetapi ada juga yang langsung menganggarkan dana, sesuai kebutuhan yang sudah tercantum di surat edaran. Jadi, tidak melibatkan aspirasi dari masyarakat.  Apa saja kendala yang dihadapi perangkat desa dalam menyusun suatu perencanaan?  Banyak mba, dalam kedaruratan kondisi dimasa *Corona*, mengakibatkan adanya perubahan prioritas serta penggunaan anggarannya. Hal ini, menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan masyarakat terhadap penggunaan dasa desa. Sehingga memicu simpang siur antara perangkat desa dengan masyarakat.  Bagaimana sikap perangkat desa dalam menghadapi rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat desa?  Kita melakukan koordinasi dengan masyarakat, dan juga memasang baner yang isinya tentang realisasi anggaran. Dengan begitu, insyaallah kan mengurangi rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat desa, mengingat dimasa *Covid* juga banyak terjadi perubahan. | Aspirasi Masyarakat  Kendala dalam Perencanaan  Perangkat desa dalam menyikapi masyarakat |

Nama Subjek : RH

Pekerjaan : Kepala Desa

Waktu : 18 Agustus 2023, pukul 8.00 – 10.15 WIB

Tempat : Kantor Subjek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelaku | Uraian Wawancara | Tema |
| Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek | Bagaimana pelaksanaan penanganan wabah *Covid-19*?  Pelaksanaannya ya dengan membuat berbagai program, dengan tujuan untuk pencegahan penularan *Virus Corona* dan juga memberikan bantuan hidup kepada masyarakat yang terkonfirmasi *Virus Covid-19*.  Program apa saja yang diberikan pemerintah desa untuk masyarakat?  Programnya ya seperti pembagian masker, handsanitizer, edukasi *Covid-19*, pembuatan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat. Selain itu, ada juga pemberian sembako untuk masyarakat yang terkonfirmasi *Covid-19* dan masyarakat tidak mampu, serta sosialisasi PHBS.  Contoh edukasi yang diberikan kepada masyarakat itu apa saja?  Ya semacam pemasangan baner-baner, poster, video, baliho, unggahan di sosial media, sampai keliling desa dengan menggunakan pengeras suara. Semua itu mencakup *Covid* semua mba, jadi masyarakat tau, dan tidak merasa takut dengan adanya *Covid* malah berdiam dirumah saja tanpa melakukan apa-apa. | Pelaksanaan Penanganan  Program dalam pelaksanaan penanganan *Covid-19*  Edukasi Masyarakat |

Nama Subjek : MAA

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Waktu : 23 Agustus 2023, pukul 12.30 – 14.50 WIB

Tempat : Kantor Subjek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelaku | Uraian Wawancara | Tema |
| Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek | Bagaimana sistem penatausahaan dalam kasus penanganan *Virus* *Covid-19*?  Penatausahaannya Alhamdulillah berjalan dengan lancar mba, meskipun jika ditinjau dari siklus mengalami keterlambatan, hal itu juga dipicu karena banyaknya intruksi baru yang harus diikuti, penyesuaian anggaran juga harus dilakukan, mengingat dalam situasi seperti ini, banyak yang harus diprioritaskan, terutama yang menyangkut *Covid-19*.  Apa yang menjadi pemicu terjadinya keterlambatan dalam proses penatausahaan?  Keterlambatan terjadi ya karena, kesibukan pelaksana kegiatan yang mengurus berbagai macam kegiatan lain yang ada di desa. Pendistribusian barang untuk masyarakat yang lambat juga menjadi salah satu pemicunya, karena proses tersebut akan mempengaruhi pembuatan SPJ untuk kegiatan yang sedang dilakukan.  Kendala apa yang terjadi dalam proses penatausahaan?  Selama masa pandemi ya kendalanya dikelangkaan barang mba. Seperti persediaan handsanitizer dan disinfektan. Waktu itu banyak dijual secara online, sedangkan kalau online bukti transakti buat di SPJ nya tidak bisa, jadi dengan cara lain perangkat desa dengan masyarakat berinisiatif membuat sendiri, bahannya ya dibeli ditoko kimia disekitaran desa, sehingga desa bisa memperoleh nota/kwitanasi untuk diselipkan di SPJ. | Penatausahaan dimasa *Covid-19*  Kendala Penatausahaan |

Nama Subjek : AP

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Waktu : 5 September 2023, pukul 8.45 – 11.20 WIB

Tempat : Kantor Subjek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelaku | Uraian Wawancara | Tema |
| Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek | Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban dalam menangani wabah *Covid-19*?  Sistem pelaporan serta pertanggungjawabannya, berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku mba. Walaupun proses penyelesaiannya sedikit terhambat, hal itu terjadi karena kedisiplinan perangkat desa, dalam penyerahannya itu kurang memperhatikan waktu, sehingga hal tersebut berperngaruh pada pencairan dana, karena desa tidak menyelesaikan sesuai pada waktu yang sudah ditentukan pemerintah.  Apakah ada kendala yang terjadi saat penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga mengalami keterlambatan?  Kendalanya ya karena banyaknya perubahan secara mendadak mba, hal tersebut membuat siklus penyusunannya mengalami kemunduran. Tetapi kemunduran itu tidak terlalu fatal, sehingga masih dianggap wajar dalam batas waktu yang masih bisa dimaklumi.  Bagaimana sikap keterbukaan informasi perangkat desa kepada masyarakat?  Keterbukaannya semacam akses pada website desa mba, terus pemasangan baner mengenai realisasi anggaran yang dipasang disudut-sudut desa, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk menilai. Dalam musyawarah desa juga perangkat desa menginformasikan mba. | Pelaporan dan Pertanggungjawaban  Kendala Pelaporan dan Pertanggungjawaban  Keterbukaan kepada Masyarakat |

Nama Subjek : MZ

Pekerjaan : Bendahara Desa

Waktu : 20 September 2023, pukul 13.15 – 15.20 WIB

Tempat : Kantor Subjek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelaku | Uraian Wawancara | Tema |
| Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek | Apa saja dukungan yang diperoleh desa pada saat pandemi?  Dukungannya ada dari instansi pemerintah, dan ada juga dari yang non pemerintah. Kalo dari instansi pemerintah itu pembinaan, pendampingan, monitoring ke bawah. Kalo non pemerintah kebanyakan barang, seperti masker, handsanitizer, disinfektan, ada juga yang bentuknya uang mba.  Hambatan yang terjadi apa saja?  Kalo hambatannya tidak ada uang transport dan honorium untuk tim pelaksana mba. Tetapi itu tidak terlalu berpengaruh pada kinerja perangkat desa mba. Selain itu, karena berkurangnya pendapatan selama pandemi mba, jadi akibatnya dana desa juga ikut dipotong pembagiannya. Yang paling mendominan hanya itu sih kalo hambatan mba.  Adakah pemberdayaan masyarakat untuk padat karya tunai?  Ada mba, perangkat desa mendukung usaha masyarakat dalam pembuatan masker, handsanitizer, dan disinfektan. Hal ini, dapat menunjang perekonomian masyarakat mba. Sehingga masyarakat tidak terlalu khawatir akan perekonomian mereka, terkhusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Karena pemerintah juga membeli barang tersebut, yang kemudian dibagikan ke masyarakat secara gratis. | Dukungan pemerintah untuk masyarakat  Hambatan yang dihadapi  Pemberdayaan Masyarakat |

Nama Subjek : HB

Pekerjaan : Bendahara Desa

Waktu : 4 Oktober 2023, pukul 9.00 – 10.50 WIB

Tempat : Kantor Subjek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelaku | Uraian Wawancara | Tema |
| Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek  Peneliti  Subjek | Bagaimana evaluasi penanganan *Covid-19* dilakukan?  Evaluasi itu dilakukan oleh lembaga dan perangkat desa. Lembaga desa melakukan pengevaluasian terhadap perangkat desa, sedangkan pengevaluasian terhadap antar pamong dilakukan secara isidentil, antara penanggungjawab dengan ketua pelaksana.  Bagaimana cara penyampaian evaluasi yang berasal dari masyarakat?  Kalo dari masyarakat akan disampaikan melalui grup whatsapp satuan tugas yang terdiri dari pihak desa dan kecamatan mba. Cara tersebut sudah dianggap efektif oleh pemerintah, mengingat pada situasi tersebut masih ada pemberlakuan untuk melakukan jaga jarak antar sesama.  Apakah selama penanganan *Covid-19* proses evaluasi sudah dilakukan secara efektif?  Sudah mba, biasanya setiap bulan kan desa mengadakan evaluasi ya, tetapi semenjak pandemi *Covid-19*, kita melakukannya ya kalau perlu saja, yang tidak rutin setiap bulannya mba. Agak dikurangi karena, intruksinya seperti itu ya kita ikuti saja. dalam keadaan *Covid* juga tidak nentu mba, jadi kita bingung kalau mau melakukan pengevaluasian secara rutin, jadi dibuat efektif saja, sesuai aturan yang berlaku. | Evaluasi Penanganan *Covid-19*  Evaluasi Masyarakat  Efektivitas Evaluasi |

1. **Rincian Belanja Penanganan *COVID-19* Tiap Desa**

Rincian Belanja Penanganan *COVID-19* per-Desa:

* 1. **Desa Rengasbandung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERLENGKAPAN** | |  |
| 1 | HVS | Rp. 325.000 |
| 2 | Pulpen | Rp. 90.000 |
| 3 | Cetak Poster | Rp. 1.400.000 |
| 4 | Banner | Rp. 5.000.000 |
|  | Skat Fiber Pelayanan | Rp. 3.000.000 |
| **TOTAL** | | Rp. 9.815.000 (2,3%) |
| **PENCEGAHAN** | |  |
| 1 | Bahan Desinfectan | Rp. 5.880.000 |
| 2 | Bahan Desinfectan Warga | Rp. 43.019.000 |
| 3 | Sabun Cuci Tangan | Rp. 1.000.000 |
| 4 | Sabun Cuci Tangan Padukuhan | Rp. 17.710.739 |
| 5 | Alat Semprot Elektric | Rp. 15.000.000 |
| 6 | Sprayer Kecil di Padukuhan | Rp. 47.604.480 |
| 7 | Handsanitizer | Rp. 3.360.000 |
| 8 | Obat dan Vitamin | Rp. 500.000 |
| 9 | Baju Hazmat | Rp. 13.200.000 |
| 10 | Sepatu | Rp. 2.040.000 |
| 11 | Kacamata Google | Rp. 2.550.000 |
| 12 | Face Shield | Rp. 500.000 |
| 13 | Sarung tangan karet | Rp. 900.000 |
| 14 | Masker N 95 | Rp. 3.800.000 |
| 15 | Lakban Kertas | Rp. 600.000 |
| 16 | Masker Moncong | Rp. 1.125.000 |
| 17 | Sarung Tangan Latex | Rp. 2.500.000 |
| 19 | Ember Bak | Rp. 375.000 |
| 20 | Masker Kesehatan | Rp. .4.760.000 |
| 21 | Termometer Infrared | Rp. 24.084.000 |
| 22 | Masker Kain | Rp. 96.620.000 |
| 23 | Tissu | Rp. 300.000 |
| **TOTAL** | | Rp.287.428.219 (66%) |
| **KONSUMSI, PENANGANAN, DAN ISOLASI** | |  |
| 01 | Konsumsi Rakor di Desa | Rp. 1.500.000 |
| 02 | Konsumsi Rapat Koordinasi Satgas Padukuhan | Rp. 27.200.000 |
| 03 | Konsumsi Posko Desa | Rp. 3.000.000 |
| 04 | Konsumsi Posko Padukuhan | Rp. 61.200.000 |
| 05 | Konsumsi Sosialisasi Desa | Rp. 2.000.000 |
| 06 | Konsumsi Sosialisasi Padukuhan | Rp. 27.200.000 |
| 07 | Konsumsi Tukang Semprot | Rp. 13.680.000 |
| **TOTAL** | | Rp.135.780.000 |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | Rp 433.788.307  (31,3%) |

* 1. **Desa Jatibarang Kidul**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERLENGKAPAN, UPAH TENAGA, DAN**  **TRANSPORTASI** | |  |
| 1 | Fotokopi | Rp. 435.900 |
| 2 | Cetak banner dan poster | Rp. 1.851.556 |
| 3 | Alat tulis kantor | Rp. 424.000 |
| 4 | Materei | Rp. 60.000 |
| 5 | Belanja BBM | Rp. 470.000 |
| 6 | Upah tenaga penyemprotan | Rp. 6.250.000 |
| 7 | Upah tenaga keamanan | Rp. 8.905.000 |
| 8 | Upah tenaga pemeliharaan gedung | Rp. 260.000 |
| 9 | Upah tenaga sopir edukasi/himbauan warga | Rp. 280.000 |
| **TOTAL** | | Rp. 19.036.456 |
| **PENCEGAHAN** | |  |
| 1 | Belanja bahan handsanitizer | Rp. 1.516.000 |
| 2 | Belanja Bahan disinfektan | Rp. 10.287.000 |
| 3 | Masker | Rp. 3.390.000 |
| 4 | Sarung tangan | Rp. 1.471.400 |
| 5 | Mantol (Jas hujan plastic) | Rp. 110.000 |
| **TOTAL** | | Rp. 16.774.400 |
| **KONSUMSI** | |  |
| 1 | Belanja perlengkapan barang konsumsi | Rp. 17.553.000 |
| Total | | Rp. 17.553.000 |
| **PENANGANAN DAN ISOLASI** | |  |
| 1 | Belanja bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat | Rp. 6.854.900 |
| 2 | Belanja perengkapan lainnya | Rp. 6.432.100 |
| 3 | Belanja obat dan vitamin | Rp. 1.813.600 |
| **TOTAL** | | Rp. 15.100.600 |
| **TOTAL KESELURUHAN (-JULI 2020)** | | Rp. 68.364.456 |

1. **Desa Pamengger**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERLENGKAPAN, UPAH, DAN TRANSPORTASI** | |  |
| 1 | Bahan Bakar Mobil | Rp. 100.000 |
| 2 | Upah Tenaga Penyemprotan | Rp. 11.075.000 |
| 3 | Pamflet Warna A3 | Rp. 50.000 |
| 4 | Banner Himbauan dan edukasi | Rp. 260.000 |
| **TOTAL** | | Rp. 11.485.000 (5,5%) |
| **PENCEGAHAN** | |  |
| 1 | Masker | Rp. 19.250.000 |
| 2 | Sarung Tangan Karet (Medis) | Rp. 1.500.000 |
| 3 | Kaca Mata | Rp. 500.000 |
| 4 | Jas Hujan | Rp. 750.000 |
| 5 | Sepatu Bot | Rp. 3.000.000 |
| 6 | Face Shield | Rp. 320.000 |
| 7 | Thermo Gun (Thermometer) | Rp. 690.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Peralatan Pendukung Pembuatan Pencegahan | Rp. 8.240.000 |
| 9 | Bahan Pembuatan Handsanitizer (Masyarakat, Fasum, Satgas, Perangkat Pemerintahan) | Rp. 4.233.500 |
| 10 | Bahan Desinfectan (Satgas Desa, Satgas Bawah Rt) | Rp. 4.930.000 |
| 11 | P3K Satgas Desa | Rp. 750.000 |
| 12 | Suplemen / Nutrisi Satgas (Sampai Tingkat Bawah) | Rp. 5.901.000 |
| **TOTAL** | | Rp. 50.064.500 (23,9) |
| **KONSUMSI, PENANGANAN DAN ISOLASI** | |  |
| 1 | Konsumsi Satgas | Rp. 16.800.000 |
| 2 | Bantuan Kebutuhan Pangan Warga Karantina (ODP), warga miskin dan warga terdampak | Rp. 130.502.500 |
| **TOTAL** | | Rp.147.302.500 (70,5%) |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | Rp. 208.852.000 |

1. **Desa Jatibarang Lor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERLENGKAPAN DAN TRANSPORTASI** | |  |
| 1 | Restu Palagan | Rp. 60.000 |
| 2 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 45.000 |
| 3 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 50.000 |
| 4 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 50.000 |
| 5 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 50.000 |
| 6 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 50.000 |
| 7 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 200.000 |
| 8 | Lem dll | Rp. 56.500 |
| 9 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 200.000 |
| 10 | Cetak Benner | Rp. 810.000 |
| 11 | Perekat | Rp. 17.500 |
| 12 | Stiker | Rp. 150.000 |
| 13 | Paku Beton | Rp. 5.000 |
| 14 | Bimo Stempel | Rp. 30.000 |
| 15 | Cetak Poster | Rp. 300.000 |
| 16 | Banner | Rp. 405.000 |
| 17 | Bahan Bakar | Rp. 200.000 |
| 18 | Bahan Bakar | Rp. 100.000 |
| 19 | Bahan Bakar | Rp. 50.000 |
| 20 | Fotokopi | Rp. 156.400 |
| 21 | Banner Pasar | Rp. 320.000 |
| 22 | Alat Kesehatan | Rp. 2.840.000 |
| 23 | Honor Tim Publikasi dan informasi COVID-19 | Rp. 200.000 |
| 24 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 100.000 |
| 25 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 20.000 |
| 26 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 50.000 |
| 27 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 50.000 |
| 28 | Cetak Benner | Rp. 320.000 |
| 29 | Cetak Benner | Rp. 265.000 |
| 30 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 200.000 |
| 31 | Pembelian Bahan Bakar | Rp. 50.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Van belt / streng | | Rp. 46.000 |
| 33 | Pipa Rucika | | Rp. 52.000 |
| 34 | Sewa Tenda dan Kursi Lipat Rapid Test Covid di Pasar | | Rp. 680.000 |
| 35 | Sewa meja besar | | Rp. 180.000 |
| 36 | Sewa meja besar | | Rp. 180.000 |
| 37 | Cetak Benner Protokol Kesehatan | | Rp. 360.000 |
| 38 | Sewa Tenda dan Kursi Lipat Rapid Test Covid di Pasar | | Rp. 660.000 |
| 39 | Cetak Benner Pakai Masker | | Rp. 200.000 |
| 40 | Honor Tim Publikasi dan Informasi COVID-19 Juni Juli | | Rp. 400.000 |
| 41 | Honor Tim Publikasi dan Informasi COVID-19 Agus- Sept | | Rp. 400.000 |
| 42 | Banner covid | | Rp. 1.520.000 |
| 43 | Pembelian Bahan bakar | | Rp. 50.000 |
| 44 | Pembelian bahan bakar | | Rp. 50.000 |
| 45 | Spanduk | | Rp. 3.600.000 |
| 46 | Kaos Satgas Inti | | Rp. 1.200.000 |
| 47 | Rompi SATGAS COVID Kantor Desa | | Rp. 18.300.000 |
| **TOTAL** | | | Rp.35.228.400 (22,9) |
| **PENCEGAHAN** | | |  |
| 1 | | Masker | Rp. 300.000 |
| 2 | | Sarung tangan | Rp. 176.000 |
| 3 | | Pembelian Vitamin dll | Rp. 2.272.000 |
| 4 | | Alat (Spryer) | Rp. 1.200.000 |
| 5 | | Bahan (tricloride) | Rp. 95.000 |
| 6 | | Jas hujan (APD) | Rp. 159.800 |
| 7 | | Holisticare | Rp. 33.100 |
| 8 | | Stereo, Horn Toa | Rp. 75.000 |
| 9 | | Alat (Spryer) | Rp. 1.300.000 |
| 10 | | Bahan (Kaporit) | Rp. 180.000 |
| 11 | | Bahan (Kaporit) | Rp. 330.000 |
| 12 | | Bahan (Kaporit) | Rp. 275.000 |
| 13 | | Bahan Disinfektan | Rp. 243.660 |
| 14 | | Garam (bahan disinfektan) | Rp. 200.000 |
| 15 | | Bahan baku disinfektan | Rp. 2.601.850 |
| 16 | | Bahan (Kaporit) | Rp. 825.000 |
| 17 | | Pembelian Hazmat/ APD | Rp. 3.237.500 |
| 18 | | Kompresor dll | Rp. 225.000 |
| 19 | | Power Spreyer dll | Rp. 2.885.000 |
| 20 | | Water torn | Rp. 2.000.000 |
| 21 | | Pembelian Jerigen | Rp. 1.296.000 |
| 22 | | Handsanitizer | Rp. 120.000 |
| 23 | | Detol | Rp. 22.000 |
| 24 | | Sarung Tangan Karet | Rp. 490.000 |
| 25 | | Ember Besar | Rp. 150.000 |
| 26 | | Handsanitizer | Rp. 1.750.000 |
|  | | Bak Sampah/ Tong sampah | Rp. 480.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 | Vitamin C | Rp. 224.000 |
| 29 | ApeDe | Rp. 1.200.000 |
| 30 | Tas Kresek Logo Covid | Rp. 450.000 |
| 31 | Masker kain | Rp. 500.000 |
| 32 | Perbaikan Alat | Rp. 9.500 |
| 33 | Perbaikan Alat | Rp. 174.500 |
| 34 | Toren | Rp. 1.050.000 |
| 35 | Perbaikan Alat | Rp. 180.000 |
| 36 | Masker dan sanitizer | Rp. 2.970.000 |
| 37 | Kaos Tangan | Rp. 60.000 |
| 38 | Selang/ sprayer | Rp. 510.000 |
| 39 | Sambungan selang | Rp. 7.500 |
| 40 | Bahan Disinfektan | Rp. 265.512 |
| 41 | Garam (bahan disinfektan) | Rp. 300.000 |
| 42 | Alkohol 95% | Rp. 2.000.000 |
| 43 | Cetak Banner | Rp. 127.840 |
| 44 | Water torn dan Wastafle Pasar | Rp. 4.000.000 |
| 45 | Sarung Tangan | Rp. 105.000 |
| 46 | Pipa Wavin | Rp. 18.000 |
| 47 | Bahan Disinfektan (SOS) | Rp. 89.500 |
| 48 | Set Wastafle dan pemasangan | Rp. 3.200.000 |
| 49 | Bahan Dasar Disinfektan | Rp. 170.922 |
| 50 | Hand Soap | Rp. 39.200 |
| 51 | Hand Soap | Rp. 94.590 |
| 52 | Sarung tangan karet | Rp. 114.000 |
| 53 | Detol | Rp. 222.860 |
| 54 | Sarung tangan Medis | Rp. 210.000 |
| 55 | Masker medis | Rp. 630.000 |
| 56 | Bahan Disinfektan | Rp. 275.705 |
| 57 | Servis Mesin spreyer COVID-19 | Rp. 130.000 |
| 58 | Bahan Disinfektan | Rp. 209.420 |
| 59 | Pembelian Sarung tangan Karet | Rp. 210.000 |
| 60 | Sarung Tangan Medis | Rp. 180.000 |
| 61 | Bahan Disinfektan (SOS) | Rp. 57.300 |
| 62 | Pembelian Disinfektan dan Saniter | Rp. 195.205 |
| 63 | Masker medis | Rp. 2.365.000 |
| 64 | Razia Masker III | Rp. 2.010.000 |
| 65 | Bahan Disinfektan saniter | Rp. 215.330 |
| 66 | Sarung tangan medis | Rp. 105.000 |
| 67 | Bahan disinfektan | Rp. 55.500 |
| 68 | Pembelian Dettol | Rp. 1.075.000 |
| 69 | Garam bahan disinfektan | Rp. 300.000 |
| 70 | Masker Scuba | Rp. 3.960.000 |
| 71 | Vitamin dan Handsanitizer | Rp. 2.520.000 |
| 72 | Sarung tangan nitril dan sanitazer | Rp. 1.020.000 |
| 73 | Sarung tangan sensi gloves | Rp. 450.000 |
| 74 | Pembelian Sarung tangan Karet | Rp. 156.000 |
| 75 | Pembelian SOS | Rp. 89.500 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 76 | Handsanitizer reffil dan vitamin | Rp. 2.520.000 |
| **TOTAL** | | Rp.59.943.794 (39%) |
| **KONSUMSI, PENANGANAN, DAN ISOLASI** | |  |
| 1 | Konsumsi Pembentukan Tim Siaga Wabah Covid | Rp. 1.340.000 |
| 2 | Koordinasi SK Kebencanaan | Rp. 1.340.000 |
| 3 | Konsumsi | Rp. 1.005.000 |
| 4 | Konsumsi | Rp. 1.340.000 |
| 5 | Sembako untuk petugas covid | Rp. 3.750.000 |
| 6 | Konsumsi | Rp. 1.172.500 |
| 7 | Konsumsi Rapid Test di Pasar 100 Orang | Rp. 3.350.000 |
| 8 | Konsumsi Repid Testdi Pasar 100 Orang | Rp. 3.350.000 |
| 9 | Konsumsi Satgas Covid | Rp. 335.000 |
| 10 | Konsumsi Satgas Covid | Rp. 335.000 |
| 11 | Sembako SATGAS | Rp. 3.000.000 |
| 12 | Subsidi Karantina | Rp. 1.235.100 |
| 13 | Sembako Isolasi 4 Orang | Rp. 900.000 |
| 14 | Bantuan Stimulan Satgas Padukuhan | Rp. 24.000.000 |
| 15 | SEMBAKO karantina mandiri (60 paket) | Rp. 12.000.000 |
| **TOTAL** | | Rp.58.425.600 (38%) |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | Rp.**153.597.794**  **153.666.994** |

5. **Desa Karanglo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERLENGKAPAN DAN TRANSPORTASI** | |  |
|  | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | Rp. 811.000 |
|  | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. 4.637.500 |
|  | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | Rp. 15.000.000 |
|  | Bahan bakar | Rp. 4.800.000 |
| **TOTAL** | | Rp. 25.248.500 (10,7%) |
| **PENCEGAHAN** | |  |
| 1 | Masker medis | Rp. 15.000.000 |
| 2 | Masker kain | Rp. 8.500.000 |
| 3 | Humidifier And Aroma Diffuser | Rp. 1.200.000 |
| 4 | Hand Sanitizer | Rp. 10.000.000 |
| 5 | Hand Wash Anti Septik 110 ml | Rp. 5.616.000 |
| 6 | Tempat Cuci Tangan | Rp. 2.400.000 |
| 7 | Desinfectant 5000 ml | Rp. 22.400.000 |
| 8 | 1 set alat pelindung diri | Rp. 2.500.000 |
| 9 | APD semprot | Rp. 200.000 |
| 10 | Kacamata | Rp. 500.000 |
| 11 | Helm APD | Rp. 2.000.000 |
| 12 | Sepatu Boot | Rp. 1.644.000 |
| 13 | Sarung tangan | Rp. 169.000 |
| 14 | Half masker dobel | Rp. 289.500 |
| 15 | Half masker singel | Rp. 209.500 |
| 16 | Filter masker | Rp. 238.500 |
| 17 | Mesin Semprot | Rp. 2.600.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | Thermometer Infra Red | Rp. 2.000.000 |
| 19 | Sarung tangan | Rp. 5.000.000 |
| 20 | Alat kesehatan | Rp. 29.664.000 |
| 21 | Thermogun | Rp. 18.172.000 |
| 22 | Vitamin | Rp. 19.800.000 |
| **TOTAL** | | Rp. 150.102.500 (63,7%) |
| **KONSUMSIPENANGANAN DAN ISOLASI** | |  |
| 1 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | Rp. 34.200.000 |
| 2 | Belanja barang bantuan untuk 16 padukuhan | Rp. 16.000.000 |
| 3 | Bantuan logistik ke padukuhan | Rp. 10.000.000 |
| **TOTAL** | | Rp.60.200.000 (25%) |
|  | |  |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | Rp. 235.551.000 |

1. **Tabel koding dan wawancara mendalam**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tema | Sub Tema | Transkip | Narasi |
| 1 | Sumber Dana | Sumber dana untuk penanganan Covid-19 dari dana desa dan PAD | -Dari dana desa sama pendapatan asli desa.  -Dari dana desa, kecuali desa Jalor tadi ya  -Dari dana desa  -Dari dana desa | Mayoritas dana yang dipakai untuk penanganan wabah Covid-19 pada desa di Kecamatan Jatibarang-Brebes sumbernya berasal dari Dana Desa (DD) sama dengan regulasi, kecuali pada desa Jatibarang Lor (Jalor) menggunakan ADD. Desa Rengasbandung juga sebagian memakai dana yang berasal dari PAD.  “Dari dana desa sama pendapatan asli desa,” Informan...  Menurut salah satu Informan, alasan yang mungkin menyebabkan desa Jalor menggunakan ADD yaitu agar mempermudah dalam melakukan perubahan anggaran atau mungkin karena memang desa itu masih mempunyai sumber dana lain selain Dana Desa yang dapat digunakan untuk penanganan wabah Covid-19.  “Jatibarang Lor, dia ndak pakai dana desa, Tapi dia memakai sumber dana lain,” |
|  |  | Sumber dana penanganan Covid-19 desa Jatibarang Lor dari ADD dan PAD | Jatibarang Lor dia nda pakai dana desa. Tapi dia pakai sumber dana lain, (Informan ) |
| 2 | Besaran Dana | Besaran total dana desa | -Karanglo, Rp 1.110.092.000,  -Kalipucang, Rp 906.032.000,  -Pamengger, Rp. 1.423.300.000,  -Jatibarang Lor, Rp. 1.170.058.000,  -Rengasbandung, Rp. 1.212.172.000  -Jatibarang Kidul, Rp. 1.210.531.000.  (Informan..  Total dana desa Rp. 1.120.000.000 (Informan...  Yang BLT Rp. 467.100.000, jadi non BLT dikurangi ini. Keseluruhan dana desa yang diterima tahun lalu Rp. 1.170.058.000, (Informan... | Keseluruhan dana yang diperoleh setiap desa yang berada di Kecamatan Jatibarang-Brebes yaitu sebagai berikut: Desa Karanglo memperoleh Rp. 1.110.092.000, Desa Kalipucang memperoleh Rp. 906.032.000, Desa Pamengger memperoleh Rp. 1.432.300.000, Desa Rengasbandung memperoleh Rp. 1.212.72.000, Desa Jatibarang Kidul memperoleh Rp. 1.210.531.000, dan Desa Jatibarang Lor memperoleh Rp. 1.170.058.000. |
|  |  | Besaran Alokasi untuk penanganan Virus Covid-19 | -Karanglo, Rp. 259.286.000.  -Kalipucang, Rp. 147.448.800.  -Pamengger, Rp. 201.791.000.  -Jatibarang Lor, Rp. 213.796.494.  -Rengasbandung, Rp. 285.101.500.  -Jatibarang Kidul, Rp. 248.720.100.  (Informan..  “Yang dana 285 juta. Yang PAD 152 juta,” (Informan...  “Jumlahnya Rp. 237.786.471 anggaran yang terealisasi Rp. 238.745.000, itu untuk Covid-19 saja,” (Informan...  “Ini mbak, 246.508.000 itu kan anggarannya, kalau yang terealisasi 208.852.000,” Informan...  “Untuk keadaan darurat sendiri, kita Rp 680.896.494, yang terealisasi Rp. 213.796.494,” (Informan... | Sedangkan di tahun 2020 untuk penanganan Virus Covid-19, Desa Karango menganggarkan dana sebesar Rp. 259.286.000, Desa Kalipucang sebesar Rp. 147.448.800, Desa Pamengger sebesar Rp. 201.791.000, Desa Rengasbandung sebesar Rp. 285.101.500, Desa Jatibarang Kidul sebesar Rp. 248.720.100, dan Desa Jatibarang Lor sebesar Rp. 213.796.292 juta. Terdapat selisih angka yang disebutkan dalam data yang dimiliki subyek 1 dan subyek 3, mengenai anggaran dana yang digunakan untuk penanganan Virus Covid-19 di Desa Jatibarang Kidul, yaitu menurut pihak desa sebesar Rp. 238.745.000. Tambahan lain, Desa Rengasbandung mempunyai tambahan anggaran kurang lebih Rp. 152.000.000 dari PAD.  “Yang dana desa 285 juta, yang PAD 152 juta,”  “Jumlahnya 237.786.471, yang terealisasi anggarannya sebesar 238.745.000, itupun untuk Covid-19 saja,” |
| 3 | Pengelolaan Dana |  | “Yang mengelola kan di pemerintahan. Tapikan SPJ nya tetap masuknya ke Bendahara,” (Informan..  Penanggungjawabnya ya lurah, terus juga ada ketua pelaksanaannya, pengampu kegiatan tersebut, terus juga ada tim kerjanya, (Informan..  Gugus tugas itu loh, (Informan..  “Cuma pamong sama lembaga. Lembaga itu meliputi RT, RW, PKK, BPKal, dan LPMKal, terus Karang taruna juga,” (Informan..  Banyak mbak, yang jelas ya perangkat desa semua ikut (masuk). Ditambah juga dari tim desa tanggap bencana, terus lainnya dari pedukuhan, (Informan...  Ndak ada istilah Bendahara khusus Covid-19, karena tanggungjawabnya tetap desa nantinya, untuk pengeluaran dan pemasukan masih lewat keuangan desa (Bendahara Desa), (Informan...  “Kebetulan yang kasus Covid-19 ini penanggungjawabnya pak lurah. Nanti juga kan ada timnya sendiri, tim itu terdiri dari semua perangkat (Pamong) desa, personilnya ya berati semua pamong desa, terus Bhabinsa, Babhinkamtibnas, relawan, dan pendamping desa,” (Informan... | Dana desa untuk penanganan Covid-19 pada desa di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dikelola oleh pamong kelurahan/perangkat desa. Kepala Desa (Lurah) yang menjadi penanggungjawabnya, serta tim yang dibawahinya yaitu gugus tugas. Pemerintah sebagai pengampu kegiatan yang sedang dikelola, sedangkan untuk masalah keuangan diampu oleh Bendahara Desa disetiap desanya. Gugus tugas itu terdiri dari seluruh anggota perangkat/pamong desa, serta perwakilan dari setiap lembaga yang ada di desa seperti dari RT, RW, PKK, BPKal, LPMKal, Karang Taruna, Babhinsa, Babhinkamtibnas, Desa Tanggap Bencana, Pendukuhan, dan Para Relawan.  “Yang mengelola kan di pemerintahan. Tapikan SPJ nya tetap masuknya ke Bendahara,”  “Penanggungjawabnya ya lurah, terus juga ada ketua pelaksanaannya, pengampu kegiatan tersebut, terus juga ada tim kerjanya,”  “Banyak mbak, yang jelas ya perangkat desa semua ikut (masuk). Ditambah juga dari tim desa tanggap bencana, terus lainnya dari pedukuhan,” |
| 4 | Perencanaan Anggaran | Perubahan Anggaran selama pandemi dari wabah Covid-19 | Pada tahun 2020 itu merupakan tahun penganggaran yang begitu berat bagi desa, karena mau tidak mau, kita harus melakukan perubahan yang lebih dari dua kali,  Yang tahun lalu terjadi dua kali perubahan mbak, tapi kalo tahun ini baru satu kali perubahan,  Mengikuti surat edaran dari Bupati, karena kejadian ini sangat mendesa. Kalo menurut Komandi dari atas, kemarin itu perubahannya sebanyak tiga kali, cuman penjabarannya itu dua kali, dan perubahan APBDesnya satu kali, (Informan.. | Pada tahun 2020 untuk tahap perencanaan anggaran dalam kasus penanganan Covid-19, pada setiap desa mengalami 2-5 kali revisi anggaran yang harus menyesuaikan dengan beberapa instruksi dari Kabupaten. Pergeseran anggaran dalam beberapa kegiatan dilakukan hanya untuk penanganan Covid-19, hal ini diakui cukup berat, namun harus tetap dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dalam kasus penanganan Covid-19 yang sebelumnya tidak pernah direncanakan di tahun yang sebelumnya.  “Sangat berat bagi desa, karena mau tidak mau ya harus tetap melakukan perubahan tersebut, meskipun ada yang melakukannya sampai 2-5 kali perubahan anggaran,”  “Kita mengikuti surat edaran dari Bupati, karena kejadian ini sangat mendesak. Komando dari atas menjelaskan bahwa kemarin perubahannya sampai tiga kali. Penjabarannya sebanyak dua kali, sedangkan perubahan APBDes nya sebanyak satu kali,”  “Dibilang hal itu kendala ya bukan mbak, tapi dibilang bukan ya sebenarnya menghambat, Cuma kita harus tetap mengikutinya,” |
|  |  | Prioritas Anggaran | Di tahun 2020 prioritasnya ya jelas untuk penanganan wabah Covid-19, Cuma wabah Covid-19 kan datang sudah agak di tengah-tengah, sekitar bulan maret. Kalau desanya sudah berlari dengan kegiatan lainnya, ya tidak bisa disalahkan juga, sudah terealisasi dan sisanya untuk Covid-19,  Kalau prioritas selain yang rutin itu tidak ada mbak, tapi kalau yang diawal tahun sudah terlanjur dilakukan, ya sudah kita pasrah saja,  Sumber dana desa ditahun 2020 itu ada mbak, stimulan dan kebencanaan ke pedukuhan itu bantuan untuk pembangunan secara fisik di sekitar pedukuhan,  Kalo tahun lalu, pembangunan masih tetap jalan sesuai dengan peraturannya, tetapi juga ada beberapa kegiatan yang dialihkan ke Virus Covid-19. Jadi prioritasnya mah sudah jelas ke Covid-19, tahun ini juga masih ke Covid-19,  Untuk pembangunan, tahun kemarin masih kita prioritaskan, karena pembangunan sudah berjalan dari awal tahun, sedangkan Covid-19 datang ditengah tahun, pembangunan itu sendiri sudah berjalan, tetapi ada beberapa kegiatan lain yang tetap harus dilakukan seperti Posyandu, hal itu karena menyangkut lansia, balita, jadi harus tetap diprioritaskan, | Prioritas anggaran dari dana desa ditahun 2020 sesudah perubahan dilakukan yaitu penanganan Covid-19. Meskipun demikian, karena perubahan tersebut terjadi di tengah-tengah tahun, maka ada beberapa program yang harus tetap dilakukan seperti pembangunan jalan atau pasar, program tersebut harus tetap dilakukan meskipun harus berdampingan dengan penanganan Covid-19, selain hal itu anggaran juga tetap dibuat untuk kegiatan serta kebutuhan rutin administrasi desa dan juga kegiatan posyandu yang menyangkut balita serta lansia.  “Kalau prioritas selain yang rutin itu tidak ada mbak, tapi kalau yang diawal tahun sudah terlanjur dilakukan, ya sudah kita pasrah saja,”  “Untuk pembangunan, tahun kemarin masih kita prioritaskan, karena pembangunan sudah berjalan dari awal tahun, sedangkan Covid-19 datang ditengah tahun, pembangunan itu sendiri sudah berjalan, tetapi ada beberapa kegiatan lain yang tetap harus dilakukan seperti Posyandu, hal itu karena menyangkut lansia, balita, jadi harus tetap diprioritaskan,” |
|  |  | Aspirasi masyarakat dalam perencanaan anggaran | Iya musyawarah, harus ada persetujuan dari BPD, karena di Kecamatan Jatibarang BPD sangat berpengaruh,  Iya, tapi masyarakat diwakili oleh pedukuhan, jadi semua perangkat/pamong termasuk juga dari pedukuhan,  Waktu itu, kita ada pembentukan suatu gugus, kita mengundang perwakilan dari masing-masing orang yang berasal dari pedukuhan. Jadi kita itu menampung aspirasi dari perwakilan yang berasal dari pedukuhan juga. Kalau yang mendesak/darurat harus dilakukan ya kita tidak perlu,  Tidak mbak, Cuma pemangku sama tim desa, kesepakatan dengan BPKal sama dukuh. Kalau biasanya dalam kondisi normal ada suatu musyawarah desa, musrenbangdes itu untuk pembuatan, sedangkan untuk perubahan tidak perlu sampai situ. Kalau APBKal di awal tahun perlu musrenbangdes,  Kita kan sudah memiliki surat edarannya yang berasal dari pemerintah, ada aturannya juga, kita lakukan ya sesuai itu. Beberapa kebutuhan yang sudah dianjurkan dalam edarannya itu apa saja, jadi kita tidak perlu menunggu aspirasi dari masyarakat,  Kalau melakukan perubahan kita tidak diperbolehkan secara internal ya mbak, kalau perubahan kemarin itu ada campur tangan dari BPKal, jadi semua perubahan yang akan kita buat harus ada campur tangan dari BPKal, | Dalam melakukan perencanaan suatu anggaran untuk kasus penanganan Covid-19, sebagian besar perangkat desa melakukan musyawarah dan koordinasi dengan BPKal/BPD serta pedukuhan sebagai perwakilan aspirasi dari masyarakat desa dan juga lembaga. Meskipun demikian, ada juga yang memilih secara langsung menganggarkan kebutuhannya sesuai yang sudah tercantum dalam surat edaran yang telah diterima, mengingat kegawatdaruratan kebutuhan dan kondisi yang harus segera terpenuhi. Dengan kuatnya peran BPKal di Kecamatan Jatibarang-Brebes, semua perubahan dilaksanakan dengan persetujuan dari pihak BPKal. Tidak dilaksanakan musrenbangdes atau musyawarah dengan masyarakat desa secara menyeluruh, karena dalam melakukan perubahan pada anggaran tidak diharuskan untuk melaksanakan musrenbangdes dan musdus seperti dalam penyusunan RPJMDes tahunan.  “Waktu itu, kita ada pembentukan suatu gugus, kita mengundang perwakilan dari masing-masing orang yang berasal dari pedukuhan. Jadi kita itu menampung aspirasi dari perwakilan yang berasal dari pedukuhan juga. Kalau yang mendesak/darurat harus dilakukan ya kita tidak perlu,”  “Kita kan sudah memiliki surat edarannya yang berasal dari pemerintah, ada aturannya juga, kita lakukan ya sesuai itu. Beberapa kebutuhan yang sudah dianjurkan dalam edarannya itu apa saja, jadi kita tidak perlu menunggu aspirasi dari masyarakat,”  “Kalau melakukan perubahan kita tidak diperbolehkan secara internal ya mbak, kalau perubahan kemarin itu ada campur tangan dari BPKal, jadi semua perubahan yang akan kita buat harus ada campur tangan dari BPKal,” |
|  |  | Kendala dalam proses perencanaan | Ya karena gini, pembangunan kan udah diselesaikan masyarakat, padahal kita masih menganggarkan untuk Virus Covid-19, nah itu agak gimana sama masyarakat, nda enak sama masyarakatnya,  Jadi kita kesusahannya itu ya mengikuti peraturan yang selalu berubah-ubah,  Dulu ada surat edaran yang harus kita penuhin ini itu, kita adakan perubahan anggaran sampai lima kali,  Kalau kendala sih banyak ya mbak, Cuma masih wajar saja sih mbak, penggeseran anggaran-anggaran yang itu saja,  Dibilang itu kendala ya bukan, dibilang bukan kendala ya sebenarnya menghambat, Cuma kita kan tetap mengikuti itu,  Banyak kegiatan yang harus kita dibatalkan, untuk melakukan pembatalan itu kita harus melakukan koordinas lagi, boleh tidak kalau dibatalkan, nanti dampaknya apa kalau dibatalkan, | Dalam beberapa rangkaian perencanaan dengan melakukan berulang kali perubahan serta kedaruratan kondisi, terdapat juga beberapa kendala yang telah ditemukan oleh pihak desa. Dalam perubahan prioritas serta penggunaan anggaran pada tahun 2020 menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan pada masyarakat setempat terhadap penggunaan dana desa. Desa Rengasbandung contohnya, desa tersebut sempat dialporkan ke kejaksaan oleh salah satu masyarakat karena terdapat kecurigaan dalam penggunaan dana desa, yang seharusnya diprioritaskan untuk kasus penanganan Covid-19, yang masih digunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang mana hal tersebut sudah terlanjur berjalan. Peraturan yang selalu berubah-ubah juga menimbulkan perubahan anggaran berkali-kali serta koordinasi yang berulang kali antara perangkat/pamong desa dalam menentukan pergeseran anggaran untuk kegiatan yang haus dialihkan untuk penanganan Virus Covid-19.  “Ya karena gini, pembangunan kan udah diselesaikan masyarakat, padahal kita masih menganggarkan untuk Virus Covid-19, nah itu agak gimana sama masyarakat, nda enak sama masyarakatnya,”  “Dibilang itu kendala ya bukan, dibilang bukan kendala ya sebenarnya menghambat, Cuma kita kan tetap mengikuti itu,” |
| 5 | Pelaksanaan Penanganan | Program-program sebagai pelaksanaan penanganan Covid-19 | Untuk Jadup yang terpapar Virus Covid-19, masker, handsanitizer, pengadaan tempat cuci tangan, pembagian masker, beberapa desa pakai pola padat karya, jadi pengadaan maskernya dengan pemberdayaan masyarakat. Anggaran minum patroli dan konsumsi tracing.  Pemberian sembako Jaminan Hidup untuk masyarakat yang terdampak dulu, BLT dana desa, Sosialisasi PHBS, sosialisasi perilaku hidup baru (masih kurang diangkat), setiap rumah dapat sembako, disinfektan, handsanitizer, masker satu paket,  Yang bikin bilik itu ya diawal-awal saja, itu mulai berhenti karena dampaknya yang kurang baik bagi kesehatan.  Penyemprotan, pengadaan untuk masyarakat tadi, terus kita juga membuat baliho, banner yang istilahnya itu edukasi masyarakat. Yang positif kita menganggarkan bagi yang kurang mampu sembakonya. Kami juga istilahnya itu memberikan anggaran kepada dusun untuk mengikuti rapat, jaga portal, dulu masih ada kan, untuk jaga portal itu dulu 2-3 bulan saja.  Portal itu kan bentuk kepedulian masyarakat masing-masing desa, jangan sampai Covid-19 masuk ke desa kita. Istilahnya peran masyarakat yang paling menonjol,  Dulu kita membagi disinfektan, kita bagikan ke masyarakat. Tapi sekarang kita menyediakan, kta juga menyediakan penyemprotan disinfektan,dimana desa desa itu membutuhan.  Masyarakat mengajukan dulu ke satgas pedukuhan, lalu satgas pedukuhan melaporkan ke desa, desa nanti ke tingkat lanjut,bentuk kerjasama dengan masyarakat.  Kita kemarin cukup banyak untuk pengadaan masker, disinfektan. Kalau tahun ini, untuk masker dan juga disinfektan sudah lebih banyak ke mandiri. Kita yang masih cukup banyak itu sembako serta alat semprot. Untuk tahun kemarin alat semprot juga diadakan, sedangkan untuk tahun ini penyemprotan dan masker banyak yang sudah mandiri. Tahun ini banyak di program sembako sama pemulasaran jenazah.  Kalau itu kemarin untuk tempat cuci hanya ada ditingkat kelurahan saja,  Kalau ini kan lebih kehimbauan, Cuma melakukan pemasangan poster-poster gitu. Kalau sudah terkena Covid-19 ada proses penyemprotan disinfektan dan pemberian suatu sembako, 2020 juga ada pembagia handsanitizer serta pembagian masker.  Tahun kemarin depan kantor desa, tahun ini di pasar desa juga ada,  2020 yang jelas kita buat sebuah selebaran juga mbak, terkait edukasi tersebut, kemudian juga diinformasikan melalui sosial media, serta banner dan famlet.  Kalau tahun kemarin kita banyak melakukan program penyemprotan, sterilisasi di lingkungan masyarakat, ada himbauan juga untuk masyarakat agar mereka selalu cuci tangan, kita juga memberikan suatu bantuan seperti masker, disinfektan, sabun, dan lain sebagainya, Jaminan Hidup/bantuan hidup untuk yang terpapar Virus Covid-19. Tapi untuk tahun kemarin ada syaratnya, yang keluarga kurang mampu,  Kalau program penyemprotan di pedukuhan ada yang mengadakan sendiri. Tapi dari desa juga ada, jadi setiap minggunya dua kali penyemprotan. Kalau ada yang positif pasti kita lakukan penyemprotan di Masjid, sekolahan, gereja, dan lingkungan sekitar masyarakat lainnya.  Cuma kita jugakan menghimbau masyarakat, muter desa dan pedukuhan menggunakan TOA. Hal itu dilakukan karena tahun kemarin masyarakat pada takut untuk keluar rumah mbak, kita juga buat video juga, dan lain-lain. | Penanganan Covid-19 pada desa di Kecamatan Jatibarang-Brebes dilakukan dengan berbagai program yang ditujukan untuk pencegahan penularan Covid-19 serta bantuan hidup bagi masyarakat yang terkonfirmasi. Program-program tersebut yaitu pembagian masker, handsanitizer, pembuatan tempat cuci tangan, edukasi pencegahan dan juga penanganan, serta penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat serta fasilitas umum secara rutin maupun sesuai permintaan.  “Untuk Jadup yang terpapar Virus Covid-19, masker, handsanitizer, pengadaan tempat cuci tangan, pembagian masker, beberapa desa pakai pola padat karya, jadi pengadaan maskernya dengan pemberdayaan masyarakat. Anggaran minum patroli dan konsumsi tracing.”    Selain itu, ada juga sosialisasi PHBS dan pemberian sembako Jadup untuk masyarakat yang kurang mampu dan terkonfirmasi positif Covid-19. Jaminan Hidup tersebut diberikan sesudah pengajuan permintaan jadup bagi tiap masyarakat yang telah terkonfirmasi Covid-19.  “Masyarakat mengajukan dulu ke satgas pedukuhan, lalu satgas pedukuhan melaporkan ke desa, desa nanti ke tingkat lanjut,bentuk kerjasama dengan masyarakat.”  Edukasi mengenai pencegahan Virus Covid-19 serta PHBS dilakukan oleh pihak desa dengan beberapa cara, yaitu mulai dari memasang poster, banner, baliho, video, unggahan di sosial media, hingga keliling desa menggunakan pengeras suara, karena masyarakat yang ketakutan akan Virus Covid-19 lebih banyak berdiam diri di rumah masing-masing.  “2020 yang jelas kita buat sebuah selebaran juga mbak, terkait edukasi tersebut, kemudian juga diinformasikan melalui sosial media, serta banner dan famlet,”  “Cuma kita jugakan menghimbau masyarakat, muter desa dan pedukuhan menggunakan TOA. Hal itu dilakukan karena tahun kemarin masyarakat pada takut untuk keluar rumah mbak, kita juga buat video juga, dan lain-lain.”  Masyarakat juga sempat berinisiatif menjaga jalan masuk ke desa serta membuat bilik-bilik disinfektan di beberapa tempat. Namun, setelah disadari dampaknya yang kurang bagus untuk kesehatan, pengadaan bilik tersebut dihapus. Selain itu, di sebagian desa masyarakat pedukuhannya juga proaktif melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri yang dilakukan oleh para relawan Covid-19 yang berada di tingkat pedukuhan.  “Portal itu kan bentuk kepedulian masyarakat masing-masing desa, jangan sampai Covid-19 masuk ke desa kita. Istilahnya peran masyarakat yang paling menonjol,” ( Informan..  “Kalau program penyemprotan di pedukuhan ada yang mengadakan sendiri. Tapi dari desa juga ada, jadi setiap minggunya dua kali penyemprotan. Kalau ada yang positif pasti kita lakukan penyemprotan di Masjid, sekolahan, gereja, dan lingkungan sekitar masyarakat lainnya,” |
|  |  | Pemberdayaan Masyarakat dan Pada Karya Tunai | Kemarin itu bikin handsanitizer, itu yang membuat sendiri. Anak Karang Taruna yang membuat, kebetulan ada yang sekolahnya farmasi jadi tau bahannya. Lalu itu dibagikan secara gratis untuk masyarakat sekitar, tidak dijual sama sekali, sumber dananya ya mengambil dari dana desa,  Kalau untuk pembuatan masker sendiri, waktu ini kita mengadakan masker dengan memberdayakan masyarakat yang bisa menjahit,  Untuk tenaga penyemprotan kita tetep kasih honor mereka,  Tenaga penyemprotan dan juga tim untuk pemulasaran jenazah kita kasih,  Waktu itu juga membuat masker, jadi kita kasih modal, trus nanti yang jahit masyarakat lalu nanti dikasihkan ke masyarakat juga. | Pemerintah desa juga melakukan program padat karya tunai untuk menunjang ekonomi masyarakat desa serta mendukung penanganan Covid-19 di setiap desa. Masyarakat diberdayakan dalam membuat masker secara mandiri untuk nantinya dibagikan kembali kepada masyarakat secara Cuma-Cuma (gratis). Bahkan, desa Pamengger memberdayakan karang taruna desa untuk mebuat suatu handsanitizer secara mandiri yang nanti juga akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Selain itu, pemerintah desa juga memberdayakan masyarakatnya sebagai tenaga penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat sekitar.  “Kemarin itu bikin handsanitizer, itu yang membuat sendiri. Anak Karang Taruna yang membuat, kebetulan ada yang sekolahnya farmasi jadi tau bahannya. Lalu itu dibagikan secara gratis untuk masyarakat sekitar, tidak dijual sama sekali, sumber dananya ya mengambil dari dana desa,”  “Waktu itu juga membuat masker, jadi kita kasih modal, trus nanti yang jahit masyarakat lalu nanti dikasihkan ke masyarakat juga,” |
|  |  | Pendampingan dan Pengawasan | Karena kami mendapimpingi di anggarannya, ada Babhinsa mitranya Babhinkamtibmas. Hanya saja mereka mendampingi di penanganan kesehatannya,  Kalau di Jatibarang-Brebes, hanya di Kecamatan saja, dan dibantu pendamping lokal satu, kemudian kami dibantu pendamping lokal ada dua orang,  Kalau pengawasan juga sering ya mbak, kadang dari BPKP, BPK juga sampel, bahkan dari KPK juga kesini,  Pendamping desa, Bhabinkamtibmas, babhinsa, bidan desa juga ada kalau dari tenaga ahli, ya perwakilan dari puskesmas,  Ada dari Kepolisian, Kecamatan, Inspektorat, PMK (Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), yang sering melakukan suatu pendampingan. Kemudian pendamping desa,  Dibilang efektif juga sebenarnya tidak mbak, dibilang tidak ya kita perlu juga, karena masyarakat kalau tidak diingatkan kadang ada yang ngeyel juga, mungkin juga jangan keseringan. | Pelaksanaan penanganan Virus Covid-19 tentunya perlu memperoleh pendampingan dan juga pengawasan yang baik agar dapat berjalan dengan disiplin dan lancar. Pemerintah desa mendapatkan pendampingan dari Kecamatan melalui pendamping desa pada tingkat Kecamatan maupun pada tingkat desa, yang bertugas mendampingi penyelenggaraan pada program desa maupun administrasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Selain pendamping desa, pihak desa juga didampingi oleh bhabinsa, bhabinkamtibmas, serta bidan desa selama proses penanganan Virus Covid-19. Pengawasan juga dilakukan oleh pihak kepolisian, kecamatan, inspektorat, dinas PMK, BPK, bahkan dari KPK.  “Pendamping desa, Bhabinkamtibmas, babhinsa, bidan desa juga ada kalau dari tenaga ahli, ya perwakilan dari puskesmas.”  “Kalau pengawasan juga sering ya mbak, kadang dari BPKP, BPK juga sampel, bahkan dari KPK juga kesini.” |
|  |  | Kendala dalam proses Pelaksanaan | Tapi, akhir-akhir ini malah, karena mungkin udah kendor lah, makin banyak,  Dari sisi warga ya mba, jadi kurang tanggap. Kita dianggap telat dalam memenuhi tuntutan mereka, gitu loh. Kan banyak yang “semprotna, semprotna,” seharusnya masing-masing desa kan udah ada satgasnya,  Untuk tahun kemarin, baru marak-maraknya lockdown ya. Kita mau mengadakan pelatihan kan juga tidak diperbolehkan. Susah kalau yang tahun sekarang, masyarakatnya sudah mulai terbiasa, untuk melibatkan masyarakat juga mulai gampang, karena masyarakat sudah mulai banyak yang ikut,  Kendalanya ya pengadaan barang, kan waktu itu banyak barang yang langka, kaya misalnya bahan untuk pembuatan disinfektan, sabun, APD, baju hazmat yang untuk petugas penyemprotan itu,  Secara umum, mungkin itu di SDM nya mbak, masyarakat dalam artian, kita mungkin sudah sosialisasi lewat famlet-famlet, sosial media, tapi ya karena kelapangan kita itu kurang. Karena kita menunggu dari yang memberikan edukasi, soalnya edukasi itu menyangkut tenang pembelajaran masyarakat mengenai penanganan Virus Covid-19,masih jarang banget mba.  Karena, kita ya gimana ya mbak, soalnya kita aja masih kurang pemahaman mengenai Covid-19 itu. Walaupun ada beberapa pelatihan tapi itu bukan yang pelatihan secara intens, hanya batas pelatihan biasa mbak. | Dalam penanganan Virus Covid-19, tentu saja mempunyai kendala. Sebagian informan mengeluhkan bahwa terdapat banyaknya kelangkaan dalam pengadaan barang yang dibutuhkan untuk pencegahan Covid-19, banyak masyarakat yang memilih untuk menutup jalan desa, hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya Virus Covid-19 di desa mereka, sehingga dari pihak desa harus berkeliling menggunakan pengeras suara dalam memberikan sebuah edukasi (pembelajaran).  “Untuk tahun kemarin, baru marak-maraknya lockdown ya. Kita mau mengadakan pelatihan kan juga tidak diperbolehkan. Susah kalau yang tahun sekarang, masyarakatnya sudah mulai terbiasa, untuk melibatkan masyarakat juga mulai gampang, karena masyarakat sudah mulai banyak yang ikut,”  Sedangkan informan yang lainnya juga mengeluhkan kurangnya inisiatif masyarakat untuk pencegahan Virus Covid-19 dilingkungan mereka sendiri. Masalahnya, disetiap pedukuhan sudah terdapat relawan Covid-19 serta Satuan tugas yang telah dibentuk, namun masih meminta bantuan pihak desa dalam proses penyemprotan disinfektan ke lingkungan sekitar mereka.  “Dari sisi warga ya mba, jadi kurang tanggap. Kita dianggap telat dalam memenuhi tuntutan mereka, gitu loh. Kan banyak yang “semprotna, semprotna,” seharusnya masing-masing desa kan udah ada satgasnya,”  Informan lainnya lagi juga mengeluhkan mengenai kurangnya edukasi langsung oleh tenaga ahli ke masyarakat, karena informan merasa bahwa perangkat desa yang telah diberi penyuluhan pun belum mumpuni dalam memberikan edukasi yang memadai untuk masyarakat.  “Secara umum, mungkin itu di SDM nya mbak, masyarakat dalam artian, kita mungkin sudah sosialisasi lewat famlet-famlet, sosial media, tapi ya karena kelapangan kita itu kurang. Karena kita menunggu dari yang memberikan edukasi, soalnya edukasi itu menyangkut tenang pembelajaran masyarakat mengenai penanganan Virus Covid-19,masih jarang banget mba.”  “Karena, kita ya gimana ya mbak, soalnya kita aja masih kurang pemahaman mengenai Covid-19 itu. Walaupun ada beberapa pelatihan tapi itu bukan yang pelatihan secara intens, hanya batas pelatihan biasa mbak.” |
| 6 | Penatausahaan | Keterlambatan | Kalau secara siklus ya agak terlambat sedikit wajar, tapi ya yang tidah berlebihan,  Terlambat tapi masih bisa untuk ditolerir, satu pelaksana kegiatan itu tidak hanya mengurus bagian itu saja, tapi juga beberapa kegiatan lainnya. Jadi kita hambatannya disitu juga sering.  Sebetulnya untuk SPJ nya maksimal 10 hari sudah harus masuk, Cuma kadang itu ada toleransi juga mbak. Kadang ya memang sampai sebulan itu juga ada,  Distribusi untuk ke masyarakatnya yang agak lama mba, sehingga laporannya jadi terhambat juga. | Pemerintah desa di Kecamatan Jatibarang-Brebes mengakui bahwa selama proses penatausahaan berjalan dengan lancar seperti kaya biasanya, walaupun dari segi siklus mengalami sedikit keterlambatan karena terdapat beberapa kali instruksi perubahan serta penyesuaian anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 pada tingkat desa, namun keterlambatan tersebut masih bersifat wajar.  “biasa saja, secara SPJnya kita tetap biasa. Tapi yang berubah-ubah itukan peraturannya serta perintah dari sananya, tetapi SPJ nya itu seperti biasa.”  “Kalau secara siklus ya agak terlambat sedikit wajar, tapi ya yang tidah berlebihan.”  Keterlambatan yang terjadi dalam proses penatausahaan sebagian besar disebabkan oleh kesibukan pelaksana kegiatan yang mengurus berbagai macam kegiatan lain yang ada di desa, serta sebagian juga disebabkan oleh lambatnya proses distribusi barang ke masyarakat yang dapat mempengaruhi pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk kegiatan tersebut.  “satu pelaksana kegiatan itu tidak hanya mengurus bagian itu saja, tapi juga beberapa kegiatan lainnya. Jadi kita hambatannya disitu juga sering.”  “Distribusi untuk ke masyarakatnya yang agak lama mba, sehingga laporannya jadi terhambat juga.” |
|  |  | Kendala yang didapat dalam proses penatausahaan | Biasa saja, secara SPJnya kita tetap biasa. Tapi yang berubah-ubah itukan peraturannya serta perintah dari sananya, tetapi SPJ nya itu seperti biasa,  Sama saja sih mbak, Cuma beda ya tidak diinput ke sistem aja, kalo yang biasanya itu sistem, kita manual.  Untuk tahun kemarin tidak ada, tahun baru ada. Kita juga waktu itu sempet tutup juga, kantor juga waktu itu sempet tutup, karena pas itu ada yang positif. Cuma kalau kinerja juga sama saja sebenarnya mbak. Online pun sepertinya semua masih standar.  Iya mba, kan dulu pas masih awal-awal kan susah nyari handsanitizer, masker juga masih susah mbak, masih mahal. Kalau lewat online kesulitanna kita pada bukti notanya mbak. Dalam SPJnya kan harus pakai nota, akhirnya kan belanjanya beli bahan mentahan, kita bikin handsanitizer sendiri, bahannya pesen di toko kimia.  Ya mungkin ada mbak, untuk yang Covid-19 ini kan untuk pengadaan barangnya kita diharuskan mempunyai notanya. Pada awal-awal kita cari disinfektan di banyak toko tapi sudah pada habis. Kita bisa belinya ke person, di pertanggungjawabannya kita kesulitan. Yang jual juga kan masyarakat perumahan biasa dia ngga punya nota bukan toko atau instansi.  Kalau pas tahun 2020 itu kan di atas harga 1 juta kan itu harus bermaterai, baru di cap tokonya, nah kesulitannya itu disitu. Kalau tahun 2021 ini karena ada perubahan, yang memakai materai 10.000 di atas 5 juta. | Adanya kebijakan mengenai menjaga jarak serta isolasi kasus yang terkonfirmasi ternyata tidak menghambat kinerja pemerintah desa dalam melakukan proses penatausahaan administrasi desa, hal tersebut dapat diatasi dengan kemudahan akses internet yang tetap memungkinkan semua pihak dapat berkomunikasi serta terhubung satu dengan yang lainnya.  “Kita juga waktu itu sempet tutup juga, kantor juga waktu itu sempet tutup, karena pas itu ada yang positif. Cuma kalau kinerja juga sama saja sebenarnya mbak. Online pun sepertinya semua masih standar.”  Kendala yang dihadapi selama proses penatausahaan yaitu kelangkaan mengenai barang-barang yang sedang dibutuhkan seperti masker, handsanitizer, serta disinfektan, karena yang tersedia, hanya dijual melalui online bukan usaha rumahan, hal ini menyulitkan pemerintah desa, karena jika dilakukan pembelian secara online bukti pembayaranya tidak bisa dijadikan sebagai bukti transaksi dalam spj nya, hal ini juga berpacu pada peraturan yang sedang berlaku. Kemudian, untuk mengatasi hal ini pemerintah desa, memutuskan untuk membuat disinfektan serta handsanitizer secara sendiri dengan membeli bahannya pada toko yang menjual bahan kimia.  “Iya mba, kan dulu pas masih awal-awal kan susah nyari handsanitizer, masker juga masih susah mbak, masih mahal. Kalau lewat online kesulitanna kita pada bukti notanya mbak. Dalam SPJnya kan harus pakai nota, akhirnya kan belanjanya beli bahan mentahan, kita bikin handsanitizer sendiri, bahannya pesen di toko kimia.” |
|  |  | Sistem yang dipakai | Pada tahun 2020 tidak memakai siskeudes jadi agak menghambat, SIDEK juga sudah dihentikan,  Kemarin itu sidek gagal, malah jadinya itu pakai manual.  Tidak ada masalah, ribetan sistem sebenarnya mba, tapi kalau saya lebih suka pakai sistem karena kita tinggal minta laporan apapun tinggal buka di situ, kelihatan, tidak usah buka-buka buku.  Tidak sih mba, sama saja. Tetap, ya memang susahnya kita harus pakai excel. | Kendala lain dalam proses penatausahaan yang ditemui yaitu gagalnya sistem penatausahaan yang hendak dipakai. Di tahun tersebut Kecamatan Jatibarang menguji coba sistem bernama SIDEK disalah satu tempat pendidikan setempat, namun di pertengahan jalan sistem mengalami kegagalan, sehingga penggunaan sistem tersebut dihentikan. Sehingga proses penatausahaannya dilakukan secara manual. Pihak desa juga mengakui bahwa mereka lebih suka menggunakan Siskeudes dalam proses penatausahaan, namun begitu walaupun proses penatausahaannya dilakukan secara manual, tetapi masih berjalan dengan lancar.  “Pada tahun 2020 tidak memakai siskeudes jadi agak menghambat, SIDEK juga sudah dihentikan.”  “Tidak sih mba, sama saja. Tetap, ya memang susahnya kita harus pakai excel.” |
| 7 | Laporan dan Pertanggungjawaban | Kedisiplinan waktu | Di akhir desember, Alhamdulillah di Kecamatan Jatibarang semuanya tidak ada kendala, karena terkait syarat dalam proses pencairan dana desa,  Ya satu bulan sebenarnya selesai. Tapi biasanya bisa langsung, begitu pencairan langsung bisa dilakukan.  Sudah sesuai semua mba, InsyaAllah sesuai dengan aturan yang di atas. Dan misalnya terlambat pun tidak terlalu, karena kita kan untuk anggaran yang di atas itu juga ada, misalnya kita belum ngumpulin ini, anggaran yang ini juga belum cair.  Kalau ketepatan waktunya ototmatis mundur mbak, karena semua kebijakan tahun kemarin kan dibuat mendadak karena situasi serta kondisi. Harus mengikuti BAK, serta kita pelaporannya agak terhambat sedikit. | Pelaporan serta pertanggungjawaban dana desa pada desa di Kecamatan Jatibarang-Brebes berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun menurut sebagian informan laporanny agak terhambat dan juga seharusnya dapat diselesaikan serta diserahkan dalam kurun waktu yang masih diperbolehkan. Hal ini dikarenakan kedisipilinan perangkat desa dalam penyerahan laporan serta pertanggungjawaban yang berdampak dan juga berhubungan dengan proses pencairan dana desa di semester dua maupun tahun kerja selanjutnya.  “Sudah sesuai semua mba, InsyaAllah sesuai dengan aturan yang di atas. Dan misalnya terlambat pun tidak terlalu, karena kita kan untuk anggaran yang di atas itu juga ada, misalnya kita belum ngumpulin ini, anggaran yang ini juga belum cair.” |
|  |  | Kendala Laporan dan Pertanggungjawaban | Pelaporannya tidak ada ada kendala, distribusi ke masyarakatnya yang agak lama, sehingga laporannya jadi terhambat juga.  Kendalanya masih wajar-wajar saja sih mba, ya itu nunggu laporan dari pelaksana kegiatan belum masuk seperti itu, kita harus ngejar-ngejar.  Ya terganggu mba, karena semester satu tahun kemarin masih dalam penyesuaian, jadi ya agak mundur laporannya. | Kendala yang dirasakan dalam proses penyusunan laporan serta pertanggungjawaban yaitu dengan banyaknya perubahan yang terjadi dengan mendadak, hal itu juga membuat siklus laporan menjadi sedikit mundur. Namun, kemunduran itu bersifat wajar dan tidak fatal sehingga dalam kurun waktu yang dibatasi masih bisa dimaklumi.  “Kalau ketepatan waktunya ototmatis mundur mbak, karena semua kebijakan tahun kemarin kan dibuat mendadak karena situasi serta kondisi. Harus mengikuti BAK, serta kita pelaporannya agak terhambat sedikit.” |
|  |  | Keterbukaan Informasi pada masyarakat | Itu yang belum LPJ, Cuma APBDesnya yang dipajang sama yang diwebsite,  Kalau disini malah justru rencana yang akan kita lakukan yang anggaran untuk tahun 2020 gitu, bukan laporan.  Ada, kita bikin banner yang semacam baliho besar, banner tapi ukurannya besar. Disetiap pedukuhan ada, sedangka diwebsite saya jarang buka, tapi ada.  Di musdes ada semacam laporan kegiatan yang sudah dilakukan. Nanti kita sampaikan secara garis besarnya saja, nanti kalau ada pertanyaan dari masyarakat, nanti kita sampaikan (jawab).  Kita ada baliho, warta desa, majalah desa juga sempat ada, dibagikan per lembaga desa,  Kita dalam bentuk IPPD, jadi kita masuka ke website nanti yang akses masyarakatnya. | Dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat, sebagian besar desa memberikan akses APBDes kepada masyarakat dalam bentuk banner yang dipasang disetiap pedukuhan, website resmi milik desa, warta desa, ataupun pada papan pengumuman desa. Namun, sayangnya hanya sebagian desa saja yang membagikan informasi mengenai realisasi dana desa setelah setahun kerja berakhir dalam bentuk seperti di atas. Laporan realisasi tetap disampaikan setiap tahun dalam musdes bersama masyarakat saat proses penyusunan RPJMDesa tahun berikutnya.  “Kalau disini malah justru rencana yang akan kita lakukan yang anggaran untuk tahun 2020 gitu, bukan laporan.”  “Kita dalam bentuk IPPD, jadi kita masuka ke website nanti yang akses masyarakatnya.”  “Di musdes ada semacam laporan kegiatan yang sudah dilakukan,  Nanti kita sampaikan secara garis besarnya saja, nanti kalau ada pertanyaan dari masyarakat, nanti kita sampaikan (jawab).” |
| 8 | Dukungan dan Hambatan | Dukungan dari Instansi pemerintah dan Non Pemerintah | Kalau dukungan mungkin dari Kecamatan, pendamping desa, dan pembinaan-pembinaan mbak, monitiring bersama-sama ke bawah.  Instansi juga ada, tapi bagi-bagi masker, kepolisian, dan kecamatan.  Dari pemerintah ya masker beberapa kali sih, tapi yang agak besar, kalo dari DPR itu disinfektan,  Ya tidak Covid-19 saja, dari Kabupaten kita kan mengelolanya sesuai dengan instruksi yang terperinci, itu bentuk dukungannya, tinggal diikuti saja.  Bantuan barang seperti masker dan disinfektan dsri perorangan, seperti anggota DPR yang menyumbang.  Sumbangan ada beberapa dari pribadi, ada juga dari organisasi, ketua PKK Kabupaten, setiap ada bantua yang masuk kaya APD, handsanitizer, disinfektan.  Karena itu untuk pedukuhan saja, karena posisinya di lockdown gitu mba. Terus dapat bantuannya khusus untuk disana saja, jadi yang menerima pedukuhan semua, waktu bulan maret itu.  Kita kurang tau, karena tidak dapat laporannya juga ya, yang menerima satgas Covid-nya, desa terus setelah itu diserahkan ke pedukuhan, karena diperuntukkannya ke sana. | Selama pandemi Covid-19, pemerintah desa di Kecamatan Jatibarang memperoleh berbagai dukungan serta hambatan dari berbagai pihak serta faktor. Dukungan berupa beberapa bantuan barang seperti masker, handsanitizer, disinfektan, kebijakan, ataupun pembinaan untuk pencegahan Virus Covid-19, hal itu didapatkan dari beberapa pihak seperti instansi pemerintah yaitu Kecamatan, kepolisian, Kabupaten, maupun individu seperti anggota dari DPR. Kabupaten juga memberikan instruksi yang jelas yang mendukung kelancaran penanganan Covid-19 pada desa di Kecamatan Jatibarang.  “Kalau dukungan mungkin dari Kecamatan, pendamping desa, dan pembinaan-pembinaan mbak, monitiring bersama-sama ke bawah.”  “Sumbangan ada beberapa dari pribadi, ada juga dari organisasi, ketua PKK Kabupaten, setiap ada bantua yang masuk kaya APD, handsanitizer, disinfektan.”  “Ya tidak Covid-19 saja, dari Kabupaten kita kan mengelolanya sesuai dengan instruksi yang terperinci, itu bentuk dukungannya, tinggal diikuti saja.”  Namun, sebagian dukungan serta bantuan diberikan langsung kepada pihak pedukuhan sehingga pemerintah desa tidak mendapatkan maupun mengetahui rincian mengenai bantuan yang diterima dan penggunaannya di tingkat pedukuhan.  “Kita kurang tau, karena tidak dapat laporannya juga ya, yang menerima satgas Covid-nya, desa terus setelah itu diserahkan ke pedukuhan, karena diperuntukkannya ke sana.” |
|  |  | Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) | Sebetulnya kalau sekarang sudah relatif ini ya, staf-staf di desa itu sudah luar biasa. Hanya perlu terus pendampingan saja, dan pembinaan gitu. | Dalam hal sumber daya manusia (SDM), perangkat desa sekarang sudah memiliki kemampuan yang cukup mumpuni, sehingga tidak ada kendala yang berarti berkenaan dengan kemampuan serta kapabilitas perangkat desa dalam mengelola serta desa masih harus selalu memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemampuan diri.  “Sebetulnya kalau sekarang sudah relatif ini ya, staf-staf di desa itu sudah luar biasa. Hanya perlu terus pendampingan saja, dan pembinaan gitu.” |
|  |  | Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM) | Yang pegang anggaran kan mereka sendiri, tapi mereka sendiri kan tidak paham kebutuhan pembinaan mereka apa.  Dari dulu saya bilang gini lemahnya dana desa, harusnya ada sebagian dana desa itu lari ke Kecamatan, untuk peningkatan kapasitas, baik pemerintah desa maupun kelembagaan desa, sehingga masyarakat itu bisa pintar.  Sangat berpengaruh, mulai transparansi, pintarnya masyarakat. | Sayangnya, menurut pengakuan pendamping desa, pihak desa kurang memperhatikan aspek tersebut serta pembinaan terhadap perangkat desa sendiri seringkali tidak di prioritaskan.  “Yang pegang anggaran kan mereka sendiri, tapi mereka sendiri kan tidak paham kebutuhan pembinaan mereka apa.  Dari dulu saya bilang gini lemahnya dana desa, harusnya ada sebagian dana desa itu lari ke Kecamatan, untuk peningkatan kapasitas, baik pemerintah desa maupun kelembagaan desa, sehingga masyarakat itu bisa pintar.” |
|  |  | Hambatan Non SDM | Cuma dulu bisa untuk anggaran, bisa untuk honor, bisa untuk transport, tapi sekarang tidak bisa,  Tidak ada, justru untuk penanganan Covid-19 ini kita tidak boleh sama sekali menganggarkan untuk honor tim pelaksana kegiatannya, Cuma untuk penanganan Covid-19 kita tidak boleh menganggarkan honor untuk TPK.  Tidak, karena kalau memang harus dilakukan ya kita tetap dilakukan, hahahahah. Ya kalau ada honor anggap saja itu bonus gitu mba.  Ada pagu anggarannya sendiri, tapi laporannya itu uang Covid-19 dipake buat pembangunan, kan masyarakat tidak tau.  Kalau kaitannya dari anggaran malah ada pemotongan dari anggaran kan mba tahun kemarin. Dana desa dipotong atau dikurangi, termasuk dari bagi hasil pajak tahun lalu. Ada pemotongan anggaran, karena untuk penanganan Covid-19 di tingkat atas.  Tidak ada, kalau saya isoman, masih ada staf-staf saya. Kalau ada masalah mba-mba ini menghubngi saya gitu. | Hambatan lain yang secara umum ditemui pada kasus penanganan Covid-19, yaitu tidak adanya uang transport maupun honorium untuk tim pelaksana kegiatan yang biasanya dapat dianggarkan apabila tidak ada penanganan Virus Covid-19. Namun menurut pengakuan informan, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja perangkay/pamong desa.  “Cuma dulu bisa untuk anggaran, bisa untuk honor, bisa untuk transport, tapi sekarang tidak bisa.”  “Tidak, karena kalau memang harus dilakukan ya kita tetap dilakukan, hahahahah. Ya kalau ada honor anggap saja itu bonus gitu mba.”  Selain itu, karena berkurangnya pendapatan pemerintah selama pandemi, dana desa pun dipotong pembagiannya disetiap desa. Kendala lainnya yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran belanja desa serta kecurigaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana desa yang disebabkan oleh tetap berjalannya sebagian pembangunan yang sudah dimulai di awal tahun. Hal tersebut membuat salah satu desa dilaporkan oleh salah seorang masyarakat ke kejaksaan.  “Kalau kaitannya dari anggaran malah ada pemotongan dari anggaran kan mba tahun kemarin. Dana desa dipotong atau dikurangi, termasuk dari bagi hasil pajak tahun lalu. Ada pemotongan anggaran, karena untuk penanganan Covid-19 di tingkat atas.”  “Ada pagu anggarannya sendiri, tapi laporannya itu uang Covid-19 dipake buat pembangunan, kan masyarakat tidak tau.” |
| 9 | Evaluasi | Evaluasi oleh Lembaga dan Perangkat, serta Efektivitas Evaluasi | Evaluasi ada, kan yang mengevaluasi masyarakat lewat BPD kalau di desa,  Disini juga dievaluasi sama panewu nurut, peran BPDnya kuat, jadi peran evaluasi berjalan dengan lancar.  Kalau evaluasi itu, begitu ada laporan, langsung ada evaluasi, kita koordinasikan saja,  Efektif, tidak nentu evaluasinya mba, kita sebelumnya setiap bulan ada evaluasi sendiri, Cuma karena sekarang situasinya seperti ini, ya kita pas perlu saja. Jadi kita lihat situasinya, kalau memang harus, ya kita ngumpul paling Cuma perangkat yang didalam tidak melibatkan dukuh.  Kalau khusus penanganan Covid-19, kalau melibatkan masyarakat tidak ada evaluasi, karena kita tidak boleh berkumpul kan mba, via online, nanti ada misalnya permintaan dari masyarakat seperti ini, kemudia kita sudah, mengadakan kegiatan seperti ini, lewat grup saja komunikasinya.  Kalau rutinnya tidak ada, ya paling koordinasi lewat wa saja, karena kan sudah ada grup satgas juga. Dikoordinasinya sekarang lebih sering lewat online daripada offlinenya.  Kalau evaluasi isidentil mba, jadi tidak terjadwal. Jadi ya kalau misal mungkin ada permasalahan baru kita kumpul bersama,  Kalau evaluasi anggaran, kita kan kiblatnya tahun lalu. Tahun lalu seberapa sih, ada kekurangan apa, kemudian disesuaikan dengan edaran yang baru kita harus menganggarkan apa.  Cukup efektif, kalau kurang pasti ada. Tapi sekarang staf-staf di desa sudah luar biasa. | Evaluasi dilakukan oleh Lembaga dan Perangkat/pamong desa. Lembaga desa yang melakukan evaluasi terhadap perangkat desa yaitu BPD, yang berperan kuat di wilayah desa-desa di Kecamatan Jatibarang-Brebes. Sementara evaluasi antara perangkat/pamong desa dilakukan secara isidentil antar penanggungjawab serta pelaksana kegiatan. Sebagian besar dilakukan secara online, kecuali apabila ada keadaan tertentu yang mengharuskan pertemuan terbatas. Apabila terdapat evaluasi atau permintaan dari masyarakat, evaluasi tersebut disampaikan melalui grup wa satuan tugas dari pihak desa maupun kecamatan. Walaupun demikian, evaluasi telah dianggap efektif memenuhi fungsinya. Sementara evaluasi anggaran dilakukan setiap akhir tahun sekaligus untuk menyusun anggaran tahun kerja selanjutnya.  “Disini juga dievaluasi sama panewu nurut, peran BPDnya kuat, jadi peran evaluasi berjalan dengan lancar.”  “Efektif, tidak nentu evaluasinya mba, kita sebelumnya setiap bulan ada evaluasi sendiri, Cuma karena sekarang situasinya seperti ini, ya kita pas perlu saja. Jadi kita lihat situasinya, kalau memang harus, ya kita ngumpul paling Cuma perangkat yang didalam tidak melibatkan dukuh." |

1. **Dokumentasi**

























